

ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN  
KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU  
AKRUAL DI DESA ONOZITOLI  
SIFAOROASI KECAMATAN  
GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI  
*By* MEI CAHYANTI TELAUMBANUA

**2**  
**ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN**  
**BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI**  
**SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI**  
**KOTA GUNUNG SITOLI**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh :**  
**MEI CAHYANTI TELAUMBANUA**  
**NIM. 2121016**

**6**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NIAS**  
**2024**

**2**  
**ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN**  
**BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI**  
**SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI**  
**KOTA GUNUNG SITOLI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada:  
Universitas Nias  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan  
Program Diploma Akuntansi

Oleh  
**MEI CAHYANTI TELAUMBANUA**  
**NIM 2121016**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NIAS**  
**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : <sup>2</sup> Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas  
Menuju Akrua Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan  
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli  
Nama : MEI CAHYANTI TELAUMBANUA  
NIM : 2121016

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing,

Serniati Zebua, S.,E M.Si  
NIDN 0103098702

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si  
NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M  
NIDN 0111038208

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Tugas akhir dengan judul <sup>2</sup> analisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual di desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gunungsitoli kota gunung sitoli yang disusun oleh Mei Cahyanti Telaumbanua dengan NIM 2121016 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, Agustus 2024  
Dosen Pembimbing

Serniati Zebua, S.,E M.Si  
NIDN. 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS  
UNIVERSITAS NIAS  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Homepage:<https://mnj.unias.ac.id> email: [mnj@unias.ac.id](mailto:mnj@unias.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mei Cahyanti Tel  
NIM : 2121016  
Program : Diploma  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Yang Menyatakan

**Mei Cahyanti Telaumbanua**

NIM. 2121008







### **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Desa Simae’asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa rapungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulisan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Serniati Zebua , S.E.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing.
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
5. Kepala Desa dan aparat desa seluruh masyarakat Desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gununngsitoli kota gunungsitoli karena telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hanya Doa yang dapat penulis berikan atas bantuan dan dukungannya. Kiranya kasih tuhan selalu menyertai dan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

**MEI CAHYANTI TEL**

NIM 2121016



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, desa menjadi fokus pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Pemerintah daerah merupakan pemerintahan terkecil yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat langsung membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program pemerintah akan lebih cepat karena merupakan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. desa. Ini adalah salah satu lembaga pemerintah Kementerian Pembangunan Pedesaan dan Hukum dalam mandatnya untuk mempromosikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat Onozitoli menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam konsep akuntansi berbasis akrual, yang memerlukan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi banyak anggotanya. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dalam hal finansial maupun tenaga kerja, membuat implementasi sistem ini menjadi lebih sulit. Keterbatasan dalam akses teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan, karena akuntansi berbasis akrual sering kali memerlukan sistem dan perangkat lunak yang lebih canggih dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Perubahan budaya dan kebiasaan kerja yang diperlukan untuk beralih dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual juga memerlukan waktu dan adaptasi. Di sisi lain, regulasi dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah dan otoritas lokal sangat penting untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif. Keberlanjutan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari pemimpin masyarakat dan individu, juga merupakan faktor kunci untuk sukses dalam jangka panjang.

Masyarakat di Desa Onozitoli Sifaoroasi sebelumnya menggunakan basis kas dalam pencatatan akuntansi mereka, yang lebih sederhana dan hanya mencatat transaksi saat kas benar-benar diterima atau dibayar. Namun, dengan transisi menuju akuntansi berbasis akrual, di mana transaksi dicatat saat terjadi, baik kas sudah diterima atau belum, muncul berbagai permasalahan. Salah satu perbedaan utama antara kedua basis ini adalah transparansi dan akurasi laporan keuangan.

Basis kas tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum direalisasikan, sehingga kurang memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan. Sementara itu, basis akrual menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mencatat semua aset dan kewajiban. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan akuntansi berbasis akrual, keterbatasan sistem dan infrastruktur pencatatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa, Desa adalah suatu badan sosial dan hukum yang mempunyai batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan permasalahan sosial, asal usul, dan warisan. . . Dan itu dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. UU Desa menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kekuasaan dan sumber daya keuangan untuk mengelola fasilitas yang ada guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan komunitasnya. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengatur kantor, menyusun rencana pembangunan desa dan melaksanakannya secara mandiri. Pengelolaan desa dan sumber daya alamnya, termasuk pengelolaan uang dan harta benda desa, merupakan tanggung jawab desa. Dalam menjalankan tugas kepala desa, pemilik rumah mempunyai tugas yang sangat berat karena desa merupakan suatu kelompok yang terhubung langsung. Di dunia sekarang ini, peran pemimpin desa sangat penting dalam mendukung segala macam kegiatan pembangunan (Putri 2019).

Menurut (Indonesia 2014) Ayat (1) Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa ekuitas rumah adalah hak dan kewajiban atas rumah yang dapat dibayar dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Disebutkan juga pada ayat (2) bahwa adanya hak dan kewajiban akan berakibat pada pendapatan, pengeluaran, keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, PP. 24 tahun 2005. PP Nomor 58 Tahun 2005 dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 13 Tahun 2006 mengatur bahwa pemerintah wajib menyusun laporan penjelasan keuangan yang meliputi laporan pelaksanaan

4  
anggaran, laporan posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan Bukti Pelaporan Lembaga Keuangan (CaLK).

4  
Menurut undang-undang otoritas pengawas nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan disingkat SAP, metode akuntansi digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan publik. Kerangka Akuntan Publik merupakan kerangka kunci untuk menetapkan dan mengembangkan standar akuntansi pemerintahan dan memberikan acuan bagi dewan standar akuntansi pemerintah, lembaga keuangan, melakukan audit dan menggunakan laporan keuangan untuk mencari solusi permasalahan. Itu belum dikendalikan oleh pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan..

Pemerintahan desa sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, terutama dengan sistem anggaran tradisional yang berbasis kas yang kurang memadai untuk mengelola kebutuhan yang semakin kompleks dan transparan. Adopsi akuntansi berbasis akrual muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan desa serta memperbaiki kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Persyaratan peraturan dan standar akuntansi, termasuk pengaruh dari inisiatif internasional seperti IPSAS, juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional tentang adopsi akuntansi berbasis akrual di tingkat desa. Meskipun transisi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, manfaat jangka panjangnya mencakup peningkatan transparansi, potensi penghematan biaya, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan desa

Desa Onozitoli Sifaoroasi. Desa ini terletak di wilayah pedalaman yang subur dengan topografi berbukit, dikelilingi oleh hamparan perkebunan milik warga desa. Onozitoli Sifaoroasi memiliki populasi sekitar kurang lebih 1500 penduduk yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan sayuran. Desa ini memiliki infrastruktur dasar yang terbatas, dengan akses jalan utama yang menghubungkan desa dengan desa terdekat yang lebih bagus, serta jaringan listrik yang telah mencakup sebagian besar desa tersebut.

Masyarakat Desa Onozitoli Sifaoroasi dikenal akan keramahan dan kebersamaannya, Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan infrastruktur, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi pendorong utama untuk kemajuan desa kedepan.

Akuntan pemerintah tidak berbeda dengan akuntan publik. Informasi akuntansi dapat dijelaskan melalui proses akuntansi khususnya analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian entri jurnal, penyesuaian neraca saldo dan laporan keuangan....

Akuntansi secara umum merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan suatu perusahaan. Laporan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (manajemen) atau tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah pada penelitian yang telah dikemukakan, masalah permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu “Bagaimana menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual.

### 1.4 Manfaat Penelitian

-Untuk Desa

Manfaat kajian bagi Desa Onozitoli Sifaoroasi adalah untuk mengetahui manfaat penerapan akuntansi desa yang baik, yang nantinya menjadikan Desa Onozitoli Sifaoroasi menjadi desa yang baik dalam perencanaan keuangan desa dan dapat menjadi percontohan bagi desa lainnya.

Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang penerapan akuntansi pada Otoritas Desa Onozitoli Sifaoroasi.

Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat tugas akhir yang sejenis.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam kerangka penelitian ini, penulis menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan Kepala desa, dan bendahara.

### 1.5.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Onozitoli Sifaoroasi kecamatan Gunungsitoli

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi untuk menganalisa sistem secara umum dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari cara-cara membangun sistem yang baik untuk digunakan dalam perusahaan.
- 2 Melakukan wawancara dengan kepala Desa, bendahara desa, untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses sistem yang sedang berjalan atau digunakan.

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif dalam proses analisis kualitatif yakni pendekatan menganalisis yang merinci dan menguraikan berbagai informasi yang menjadi suatu objek penelitian. tanpa melibatkan perhitungan statistik maupun data numerik. pendekatan ini melibatkan perbandingan antara fakta yang ada dengan teori yang berlaku pada Desa Onozitoli Sifaoroasi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi pemerintah**

##### **2.1.1 Akuntansi Pemerintah**

1 Akuntansi secara umum dibagi menjadi akuntansi swasta dan akuntansi publik dapat didefinisikan sebagai normal. teknis Dan alat analisis akuntansi digunakan untuk pengelolaan NGGI, seperti penganggaran publik. sub-negara, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial, proyek kemitraan publik-swasta, dll. Fungsi akuntansi publik yaitu.. (New Lestari, Karamoy, Tang Kuman, 2014):

1. Negara tidak mencari keuntungan.
2. Negara-negara mencatat anggarannya pada saat pencatatannya.
3. Berbagai jenis dana dapat digunakan dalam akuntansi publik.
4. Dalam akuntansi pemerintahan, belanja Aset seperti bangunan dan kendaraan dicatat di neraca beserta perkiraan laba operasi.
5. Dalam akuntansi pemerintahan, neraca tidak memuat perkiraan ekuitas dan akumulasi keuntungan..

Akuntansi publik dibedakan menjadi akuntansi publik dan akuntansi jaminan sosial.. Menurut Nordia One, Putradhan Rahmawati (2012:4) dalam (Tulangow dan Ilat 2014) Hal ini menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan diri pada Pendaftaran dan pelaporan transaksi yang terjadi di organisasi pemerintah. Menurut Ghazali dan Ratmono (2008:3) data akuntansi digunakan untuk akuntansi pemerintahan. Memberikan informasi mengenai transaksi perekonomian dan keuangan nasional, termasuk instansi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. 1 Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus menetapkan standar akuntansi daerah sehingga dapat diterapkan secara seragam di seluruh pemerintah daerah. Akuntansi pemerintahan menggunakan beberapa standar akuntansi: kas, kas, kas dan kas. (GOOD 2015).

#### **2.2 Berbasis Akrua**

##### **2.2.1 Definisi Berbasis Akrua.**

Laut Ratmono dan Mahfud Shulihin (2015:11). dalam (Alwie dkk. 2020), Akuntansi akrual adalah standar akuntansi yang mencatat dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, terlepas dari waktu Anda menerima uang atau jumlah uang yang sama.

Menurut Yan Hoksada (2015:78), akrual adalah suatu metode akuntansi dimana pendapatan dicatat pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan pendapatan



(pendapatan pertama atau terakhir), atau penerimaan kredit). , pengeluaran dicatat pada saat terjadinya (dibayar di muka, dibayar tunai, atau terjadi meskipun belum dibayar) tanpa memperhatikan penerimaannya.

Halim dan Kosfi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual dapat mencapai tujuan pelaporan yang tidak dapat dicapai dengan basis kas. Tujuan laporan adalah untuk pengelolaan dan pemantauan. Banyak permasalahan yang dapat diidentifikasi ketika menerapkan situs tersebut, antara lain Bastian (2010:120)..

1. Petugas menentukan jumlah transaksi yang dicatat dalam jurnal.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas jika dikaitkan dengan akuntansi historis dan akuntansi historis.
3. Proses manajemen dan manajemen biaya harus lebih kompleks dibandingkan arus kas.
4. Peluang manipulasi keuangan sulit dikendalikan.
- 5.

Akuntansi akrual bertujuan Untuk mengatasi kekurangan akuntansi keuangan untuk pelaporan yang lebih akurat.Tujuannya adalah untuk menjadikan informasi mengenai belanja publik lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di pihak berwenang dengan memanfaatkan informasi secara lebih baik, daripada menggunakan uang.

#### **2.2.2 Tujuan penggunaan accrual basis**

Tujuan penggunaan accrual basis adalah

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- b) Memperbaiki administrasi perpajakan dan pengelolaan aset.
- c) Meningkatkan tanggung jawab penyerahan barang dan jasa dari pihak yang berwenang. Seperti inilah tampilannya.
- d) melaporkan kepada pihak yang berwenang pada saat mengambil keputusan.
- e) Reformasi sistem anggaran. dan
- f) meningkatkan transparansi mengenai biaya layanan yang diberikan oleh pihak berwenang. (Margarta, 2015) SE

#### **2.2.3 Keuntungan basis pendapatan**

Keuntungan menggunakan rekening

- a) Pendapatan memberikan gambaran lengkap mengenai situasi keuangan pemerintah.

- b) Informasi ini tunduk pada pembatasan oleh pihak berwenang.
- c) sudah tidak asing lagi bagi banyak orang dan telah dilaporkan.
- d) standar yang dapat diterima.
- e) Manajemen dan pengembangan yang kuat.

## **2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

### **2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Berdasarkan Undang-undang Pemerintah No. 74-71 Tahun 2010 ayat 1 pasal 1 mengacu pada standar akuntansi publik yang disingkat SAP, tata cara akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2013). Menurut KSAP (Organisasi Standar Akuntansi Pemerintahan), standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPPD). Kerangka akuntabilitas penyelenggaraan rekening publik yang jelas dan transparan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPPD (KSAP, 2015). Dari pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman wajib dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi otoritas pusat dan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam definisinya.

### **2.4 standar akuntansi pemerintahan berbasis biaya.**

#### **2.4.1 Penjelasan. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaL.**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ayat (8) pasal 1 dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah SAP mengakui pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan terutama berdasarkan basis entri keuangan dan akuntansi pendapatan, pengeluaran dan sumber daya keuangan dalam laporan pelaksanaan anggaran. Tergantung peruntukannya yang ditentukan dalam APBN atau APBD 2.4.2.

Yang juga penting, tidak mudah mengganti personel (SDM) yang terbiasa dengan pedoman lama. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa akuntansi akrual diperlukan agar informasi yang disajikan dapat disajikan secara transparan dan bertanggung jawab. Standar akuntansi publik berbasis akrual diterapkan di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi berbasis akrual disajikan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan memuat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Peralihan dari akuntansi kas ke akuntansi akrual menjadi akuntansi akrual penuh berdampak pada pencatatan dan jenis laporan keuangan yang disusun. Kapan

akrual harus diselesaikan secara penuh untuk mencerminkan kemajuan, transaksi atau kejadian, keuntungan yang didapat dengan menerapkan regularisasi T adalah representasi informasi operasional atau operasional. Dalam akuntan publik, menggambarkan perkembangan operasi atau kegiatan, disusun sebagai laporan operasi atau laporan surplus atau defisit. Dengan terbitnya PP No. Menurut Perpres 71 Tahun 2010, penerapan standar akuntansi publik berbasis akuntansi akrual mempunyai dasar hukum. Terbitnya Permendagri 64 tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi akrual yang diterapkan sejak tahun 2015. Artinya pemerintah wajib segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggal 24 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan adanya piutang, Aset tetap, Hutang mencerminkan proses akuntansi yang dipengaruhi oleh prinsip akuntansi akrual. Perbedaan nomor PP. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24/2005, tentang Komponen Laporan Keuangan,

**tabel 2.1 Komponen Laporan Keuangan**

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Arus Kas	3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Laporan Operasional
	6. Laporan Perubahan Ekuitas
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan

*Sumber:olahan penulis*

Penyampaian laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010,

1. Laporan pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pusat/daerah menunjukkan kesesuaian dengan APBN/APBD. Laporan pelaksanaan anggaran memberikan gambaran mengenai aset, distribusi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh negara/daerah. Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan. ILMU TINGGI.
2. Laporan perubahan saldo anggaran Menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran pada tahun referensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan perimbangan anggaran lebih sebanding dengan periode sebelumnya dengan isi sebagai berikut:

- a) Menyeimbangkan anggaran sebelumnya
- b) Memanfaatkan kelebihan saldo anggaran
- c) Kurang lebih sisa saldo anggaran tahun berjalan
- d) Memperbaiki kesalahan akuntansi tahun sebelumnya
- e) Dst.
- f) Saldo anggaran akhir

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelapor dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Setiap unit pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan aset serta liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Setiap unit pelaporan menyajikan setiap item aset dan liabilitas termasuk jumlah – jumlah yang diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, kegunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal rintangan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan konversi.
5. Laporan operasional Ditampilkan sebagai berikut: LO-Pendapatan dari aktivitas operasi, Beban dari aktivitas operasi, Surplus/defisit dari aktivitas non-operasional, Luar biasa, Surplus/defisit-LO. Bagian, bab, dan sub-bagian tambahan disajikan dalam uraian aktivitas yang disyaratkan oleh standar ini atau diperlukan untuk menunjukkan keandalan dan keakuratan hasil operasi entitas pelapor..
6. Laporan perkembangan saham merupakan laporan kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya..
7. Informasi pelaporan keuangan meliputi penjelasan atau data rinci mengenai laporan pengelolaan anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Informasi laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diperlukan dan direkomendasikan untuk dipublikasikan sesuai dengan standar akuntansi publik dan pengungkapan yang tepat untuk memberikan laporan keuangan yang akurat...

nomor PP. Pasal 71 Pengertian APBD tahun 2010 adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah

1. Perorangan
2. Perwakilan masyarakat, lembaga inspeksi dan kantor pemeriksa
3. Kelompok yang merupakan anggota masyarakat dan mempunyai akses terhadap pajak, investasi dan utang
4. Pemerintah (Baru, 2015).

24.3 Hambatan penerapan SAP berbasis akrual pada PP 71 Tahun 2010

Hambatan penerapan standar akuntansi akrual adalah:

Hambatan penerapan standar akuntansi akrual adalah:

1. Kompleksitas laporan keuangan. Jumlah laporan yang harus disiapkan pemerintah semakin bertambah, yakni 6 laporan dan 1 CALK di samping laporan utama dan sub-laporan. Kekuasaan ini dapat mempengaruhi perubahan sistem akuntansi pemerintah sehingga mengakibatkan alokasi anggaran yang besar..
2. Kondisi lahan. Persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas adalah perlunya sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan sesuai PP No. 24 Tahun 2015, tidak sama persis dengan PP. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan keuangan yang mendapat pemberitahuan dari Badan Pemeriksa Keuangan..
3. Manfaat implementasi SAP dalam hal uang. Penerapan SAP berbasis akrual dapat mempersulit proses penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan serta tahap audit BPK RI karena banyak laporan yang dibuat berdasarkan SAP. Menurut hal. Nomor 24 Tahun 2005.
4. Status pengendalian intern Pemerintah belum memadai.

2.5 Peran Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Standar Akuntan Publik

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh dunia usaha/organisasi. Banyak definisi yang digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Navawi dalam Aldiani (2010), ada tiga pengertian sumber daya manusia:

1. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam lingkungan organisasi.

2. Hal ini dapat diperoleh dari potensi yang nyata, bukan potensi nyata untuk mengetahui keberadaan organisasi.
3. Sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang menggerakkan suatu organisasi menjadi global.

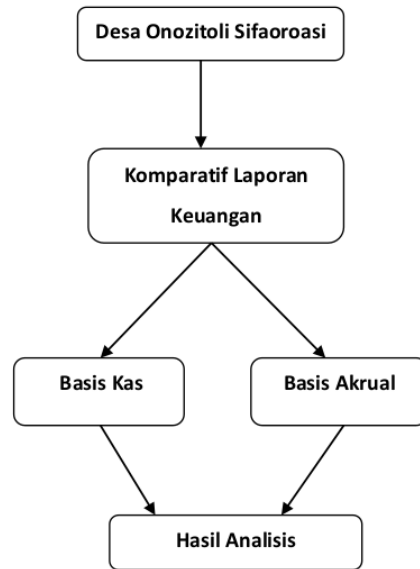
9 Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memerlukan sumber daya manusia yang terampil. Otoritas lokal sangatlah penting. menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan memahami permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi SAP. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pemahaman dan penerapan metode, teknik, dan peraturan Dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangan tidak disusun dengan baik dan final disampaikan

### 2.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.5.1 penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti & Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Friska Langelo&David Paul Elia Saerang Universitas Sam Ratulangi Manado(2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual.
2.	Sony Lamoniis Universitas Sam Ratulangi Manado (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon	Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berbuah menjadi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015.
3.	Nursakilah Lubis&Nurlaila Nurlaila Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal	Penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal digolongkan dalam tahap persiapan menuju kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
4	Anastasya A. Lasabuda& Jenny Morasa &Victorina Z. Tirayoh Sam Ratulangi University(2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual atas penyajian laporan keuangan mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif.

## 2.6 kerangka pemikiran



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Onozitoli Sifaoroasi terletak di kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani, dengan hasil pertanian utama berupa kelapa, karet, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Desa ini masih memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih terjaga. Akses ke desa ini cukup terbatas, dengan infrastruktur jalan yang masih dalam pengembangan, sehingga menjadikannya lokasi yang relatif terpencil namun penuh dengan kekayaan budaya dan alam yang belum banyak tersentuh.

Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi adalah pusat administrasi pemerintahan desa yang melayani masyarakat setempat dalam berbagai urusan dan kebutuhan administratif. Kantor ini terletak di tengah-tengah desa, sehingga mudah diakses oleh seluruh warga desa. Bangunan kantor desa biasanya sederhana, namun fungsional, dengan ruang-ruang yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ruang kepala desa, ruang rapat, dan ruang pelayanan masyarakat.

Di kantor desa ini, berbagai layanan disediakan, termasuk pengurusan surat menyurat seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili, dan surat-surat lain yang diperlukan oleh warga. Selain itu, kantor desa juga berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Kantor desa ini juga menjadi pusat koordinasi bagi berbagai program dan kegiatan desa, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Misalnya, program-program pertanian, kegiatan gotong royong, hingga penyelenggaraan acara adat sering kali dikoordinasikan melalui kantor desa ini. Kepala desa beserta perangkatnya bertugas memastikan bahwa seluruh program desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.



### 3.1.2 Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Onozitoli Sifaoroasi

Sejarah singkat desa onozitoli sifaoroasi merupakan sebuah wilayah yang berada dikecamatan Gunungsitoli. Dan menurut beberapa tokoh masyarakat desa onozitoli sifaoroasi awalnya bernama "HILI ONOZITOLI", nama tersebut berdasarkan letak geografis yang berupa gunung dan dalam istilah Harafia HILI ONOZITOLI diartikan sebagai hili siteoli.

Seiring semakin padatnya penduduk hili onozitoli, maka beberapa masyarakat desa memperluas wilayahnya dan bermukim disebuah wilayah bersebelahan dengan onozitoli yang namanya sifaoroasi. Sehingga saat ini dinamakan desa onozitoli sifaoroasi, kemudian kepala kampung desa onozitoli sifaoroasi yang masih di ingat sampai ini yang pertama yaitu **Sarao Telaumbanua** dalam panggilan mbalugu lai mbaluo. Pada tahun 1970 perkiraan pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa atas nama **FATOLOSA LASE** dan dia berasal dari unsur tentara, dan sejarah singkat tentang desa onozitoli sifaoroasi. Kemudian tentang perkembangan hingga saat ini desa onozitoli sifaoroasi sekarang ditambah dengan penduduk yang begitu banyak kurang lebih 2159 yang terdata di Dinas Kependudukan.

Demikian juga mata pencaharian penduduknya semuanya beralih dari pertanian, perkebunan dan bahkan sekarang lahan pertanian berkurang mereka bekerja sebagai buruh harian lepas. Dan itulah sejarah singkat perkembangan desa onozitoli hingga saat ini. Perkembangan desa onozitoli sifaoroasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang dimana jumlah kelahiran lebih banyak di bandingkan jumlah kematian. Ditambah lagi dengan perpindahan dan mutasi penduduk, sebagian besar berpindah dan sebagian juga masuk ke desa onozitoli sifaoroasi sehingga perkembangan dari tahun ke tahun tetap naik.

Masalah keuangan desa telah diatur didalan peraturan Permendagri nomor 46 tahun 2016 bahwa kepala desa atau pemerintahan desa berkewajiban memberikan informasi kepada warga masyarakat secara transparan baik pertanggungjawaban keuangan yang dimana 2 tempat papan informasi tentang laporan keuangan desa pertanggungjawaban 2023.

### 3.1.3 Visi Misi Desa Onozitoli Sifaoroasi

#### Visi :

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan desa Onozitoli Sifaoroasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Onozitoli Sifaoroasi seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa Onozitoli Sifaoroasi adalah :

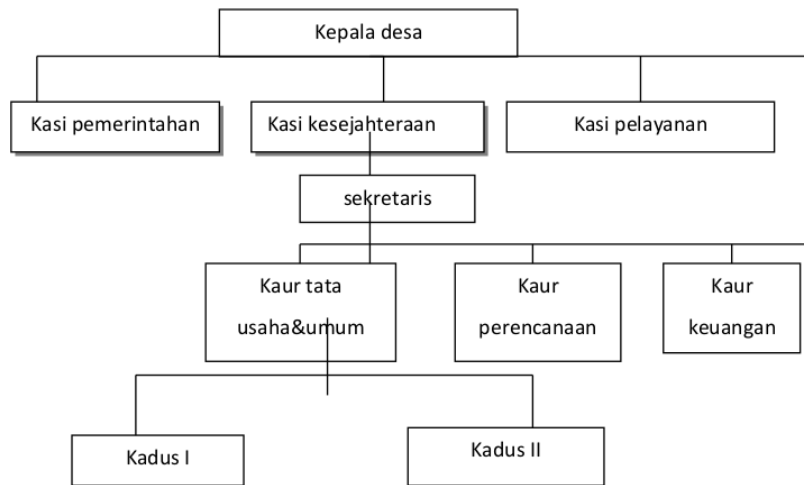
1. Sehat (Jasmani dan Rohani)
2. Nyaman dan Tentram
3. Berbudaya dan Berkarakter
4. Sejahtera
5. Maju

#### Misi :

Untuk Menmpertanggungjawabkan Visi di atas diperlukan upaya melalui kegiatan yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan serta menguatkan fungsi dan kinerja pemerintah desa Onozitoli Sifaoroasi secara efektif dan efisien yang berbasis pada pelayanan masyarakat yang adil dan merata berlandaskan takut akan Tuhan.
2. Mengintegrasikan fungsi antar lembaga yang ada di desa Onozitoli Sifaoroasi secara harmonis dan berkesinambungan.
3. Menselaraskan program pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan memaksimalkan penggunaan dana desa yang bersifat Swakelola masyarakat serta menguatkan kegiatan usahan masyarakat melalui badan usaha Milik Desa (BUM Des).

#### 1.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Onozitoli



### **3.1.5 Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa**

1. Kepala desa, sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola semua aspek pemerintahan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.
2. Kasi Pemerintahan, di bawah kepala desa, fokus pada urusan administratif dan hukum, termasuk pelaksanaan peraturan desa dan pengawasan kegiatan pemerintahan.
3. kasi Kesejahteraan bertugas memastikan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat berjalan efektif, termasuk bantuan sosial dan kesehatan.
4. Kasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik sehari-hari, seperti administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat.
5. Sekretaris Desa mengelola administrasi internal desa, menyusun laporan, dan mendukung kepala desa dalam tugas-tugas administratif.
6. Kaur Tata Usaha dan Umum mengelola dokumen, arsip, dan kebutuhan umum desa, serta mendukung kegiatan administrasi dan komunikasi.
7. Kaur Perencanaan bertugas menyusun rencana pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya, memastikan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
8. Kaur Keuangan mengelola anggaran dan laporan keuangan desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
9. Kepala Dusun, sebagai perwakilan kepala desa di tingkat dusun, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun, menyampaikan aspirasi masyarakat dusun kepada kepala desa, serta membantu dalam pelaksanaan program-program desa di wilayahnya.

### 3.2 Pembahasan

#### “Bagaimana Menganalisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual”?

Menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual melibatkan perbandingan antara laporan yang disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan laporan yang mencatat transaksi pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Langkah pertama dalam analisis ini adalah memahami perbedaan antara basis kas dan basis akrual, di mana basis kas mencatat pendapatan dan beban hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan, sementara basis akrual mencatat transaksi pada saat pendapatan diperoleh atau kewajiban diakui. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi item-item seperti piutang, utang, pendapatan diterima dimuka, dan beban dibayar dimuka yang membedakan kedua basis ini. Untuk melakukan analisis, laporan keuangan berbasis kas perlu disesuaikan ke basis akrual dengan menambahkan piutang dan beban yang masih harus dibayar, serta menghapus pendapatan diterima dimuka dan beban dibayar dimuka. Analisis ini mencakup perbandingan antara komponen-komponen laporan keuangan berbasis kas ke komponen-komponen laporan keuangan berbasis akrual.

#### Komponen laporan keuangan

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	8. Laporan Realisasi Anggaran
7. Neraca	9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8. Laporan Arus Kas	10. Neraca
9. Laporan Perubahan Ekuitas	11. Laporan Arus Kas
10. Catatan Atas Laporan Keuangan	12. Laporan Operasional
	13. Laporan Perubahan Ekuitas
	14. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 2.2 komparatif laporan keuangan

komponen	Basis kas	Basis akrual
Laporan realisasi anggaran (LRA)	Menampilkan pendapatan dan belanja ketika kas diterima atau dibayarkan	Menunjukkan pendapatan dan belanja sesuai anggaran namun tidak memperhitungkan piyang dan utang belum terjadi
Laporan perubahan saldo anggaran lebih(sal)	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan perubahan dalam saldo anggaran lebih(sal) yang dihasilkan surplusatau devisit anggran

neraca	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.
Laporan operasional	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan seluruh pendapatan dan beban pemerintah dalam suatu periode akuntansi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Arus kas	Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.	Basis kas, tetapi sebagai pelengkap laporan berbasis akrual untuk menunjukkan perubahan kas
Laporan perubahan ekuitas	Tidak tersedia dalam basis kas	Menunjukkan perubahan ekuitas selama periode akuntansi, termasuk surplus atau defisit, koreksi, dan penyesuaian lainnya.
Catatan atas laporan keuangan	Terbatas atas informasi kas yang relevan.	Menyajikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, estimasi penting, serta penjelasan tambahan terkait item dalam laporan keuangan dalam berbasis akrual

Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual pada pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pencatatan dan pelaporan. Pada basis kas, laporan yang disajikan lebih terbatas hanya mencakup Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, di mana pendapatan diakui saat kas diterima, dan belanja diakui saat kas dibayarkan. Tidak ada laporan yang mencerminkan posisi keuangan atau operasional secara keseluruhan, seperti neraca atau laporan operasional, karena basis kas tidak mencatat piutang, utang, atau aset tetap.

Sebaliknya, laporan keuangan berbasis pendapatan menunjukkan keadaan keuangan pemerintah. Basis akrual tidak hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran tetapi juga memperkenalkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan perubahan surplus atau defisit anggaran. Neraca menjadi komponen utama dalam basis akrual, menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan mencatat seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Selain itu, Laporan Operasional mencakup seluruh pendapatan dan

beban, tidak tergantung pada penerimaan atau pembayaran kas, yang memberikan wawasan tentang kinerja operasional pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas dalam basis akrual tetap relevan dan disajikan untuk melengkapi laporan keuangan lainnya dengan menunjukkan perubahan kas selama periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga diperkenalkan untuk mengungkapkan perubahan ekuitas pemerintah yang tidak hanya berasal dari surplus atau defisit, tetapi juga penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas secara langsung. Catatan atas Laporan Keuangan dalam basis akrual memberikan informasi yang lebih rinci dan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi dan estimasi penting, yang tidak ditemukan dalam basis kas.

### **Laporan realisasi anggaran (LRA)**

Tidak terdapat perbedaan LRA pada laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis klien karena adanya perbedaan penggunaan SAP. LRA ditampilkan dalam dana dalam laporan keuangan di CTA dan dalam laporan keuangan. Yang membedakan adalah LRA. Kedua laporan keuangan tersebut memuat bagian pendapatan, pengeluaran, dan simpanan terpisah, yang tidak sama setiap tahun. Perbedaan tersebut adalah:

1. Transfer dana dalam bentuk dukungan keuangan dari pemerintah provinsi lain hanya terdapat pada LRA 2015 dan pendapatan wajib lainnya dalam bentuk dana tunai tidak terdapat pada LRA 2014.
2. Perbedaan jenis pembayaran khususnya biaya administrasi berupa pembayaran bank dapat dilihat pada LRA tahun 2014.
3. Selisih transfer berupa tunjangan lainnya di LRA 2015 hanya 18.

### **Laporan perubahan SAL**

Laporan perubahan SAL hanya tersedia di akun reguler. Laporan SAL yang dimodifikasi disusun berdasarkan anggaran, namun tidak tercermin dalam laporan keuangan CTA. Akun SAL muncul dalam akun berdasarkan akrual untuk dibandingkan dengan akun pendapatan dan pengeluaran LRA. Saat ini di database CTA, pendapatan dan pengeluaran dilacak langsung ke dana, sehingga tidak ada rekening SAL. Laporan Perubahan SAL menyajikan SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan hibah tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, perubahan rekening masa lalu, dll. dan SAL akhir.

## **Neraca**

Baik metode akrual maupun metode CTA menggunakan metode akrual untuk mengakui, mengukur, dan mencatat aset, liabilitas, dan memang demikian. Oleh karena itu, informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan dalam neraca secara akrual sama dengan informasi dalam akun metode pembayaran. Perbedaan yang terjadi adalah sifat klasifikasi dan jenis akun yang dipilih. Misalnya, dalam neraca berbasis CTA, entri jurnal diposting ke akun aset dan liabilitas berdasarkan basis akrual. Perbedaan pelaporan keuangan antara saldo kas dan saldo CTA adalah:

1. Neraca akrual memberikan informasi tentang akun-akun yang beredar. Neraca memberikan informasi mengenai pendapatan/beban yang diterima/dibayar, dimuka (dibawa ke depan) dengan menggunakan metode aset/liabilitas. Pencatatan ini tidak ditampilkan dalam neraca terkait CTA, karena program CTA mengakui pendapatan dan biaya/beban secara tunai, sehingga pendapatan tersebut diakui sebagai penerimaan dan pembayaran/beban yang dibayarkan dengan rekening langsung pada saat kas atau setara kas diterima. Diterima/Dibayar Manfaat perbedaan ini adalah akumulasi saldo dapat memberikan informasi mengenai nilai barang/jasa yang belum diterima di masa yang akan datang relatif terhadap jumlah yang dibayarkan/diterima sebelum.
2. Neraca menyajikan informasi pendapatan dan pengeluaran (pos akrual). Informasi ini mencakup hutang dan kewajiban seperti pajak, biaya, biaya, dll. Neraca CTA juga mencatat debit untuk mencatat pendapatan yang diterima dan didukung dengan dokumen resmi seperti nasehat perpajakan, namun tunai/tunai. sama dengan belum diterima. Hutang Usaha dan Cadangan Hutang Usaha (bukan pendapatan) dicatat untuk transaksi ini. Saat ini untuk akumulasi beban, saldo CTA hanya mengakui kewajiban bunga saja dan tidak mengakui/mengakui beban utang lainnya, contoh: dampak selisih ini dapat berupa Neraca memberikan informasi mengenai nilai pendapatan/beban. terhutang Diakui sebagai pendapatan dan diperlakukan sebagai pendapatan/pembayaran, tetapi jumlah/uang yang sama diterima/tidak dibayar..
3. 3. Neraca periodik menyajikan informasi mengenai penyusutan aktiva tetap. Dalam metode akrual, penyusutan aset tetap dicatat sebagai beban penyusutan yang disajikan dalam LO, dan akumulasi beban penyusutan disajikan dalam neraca. Dalam database CTA, transaksi yang berkaitan dengan aset tetap seperti pembelian, penjualan dan pelepasan aset tetap



dicatat pada akun pendapatan tetap dan investasi pada akun pendapatan tetap. Informasi aset tetap yang disajikan dalam neraca pada CTA tidak lengkap karena hanya menampilkan nilai bersih aset tetap pada tanggal pelaporan dan tidak sebesar nilai penyusutan aset tetap sampai dengan tanggal pelaporan. Manfaat dari perbedaan tersebut adalah neraca dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aktiva tetap sejak digunakan sampai dengan tanggal neraca..

4. Neraca menunjukkan secara moneter, menunjukkan nilai bersih kekayaan pemerintah, dikurangi dengan akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan, terutama neraca/defisit LO, termasuk kenaikan/penurunan keakuratan karena perubahan kosmetik sekaligus, CTA-air tidak sepenuhnya mencerminkan keakuratan presentasi. Reksa dana hanya memuat rekening-rekening yang muncul karena merupakan catatan berwarna yang membantu mencatat dan mencatat aset dan kewajiban secara akrual. Selain itu juga ada SiLPA/SiKPA berdasarkan satuan keuangan yang dihitung berdasarkan dana. Ekuitas digunakan dalam neraca CTA untuk menyeimbangkan aset dan kewajiban, yang tidak mencerminkan laba bersih pemerintah secara akurat. Dampak dari perbedaan tersebut adalah saldo tersebut mewakili nilai wajar, yang merupakan nilai sebenarnya dari kekayaan bersih pemerintah, yang informasinya diberikan kepada EPL..

#### **Laporan Operasional (LO)**

LO pada akun-akun disajikan berdasarkan basis akrual. Berdasarkan CTA, entitas pelapor diperbolehkan untuk menyiapkan laporan kinerja keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba/rugi berdasarkan basis akrual. Namun pelaporan tidak mengikat kinerja keuangan ini. LO melaporkan pendapatan, pengeluaran dan saldo/kerugian berdasarkan basis akrual, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima. LO menunjukkan pendapatan, pengeluaran LO, pendapatan operasional, pendapatan operasional, pendapatan operasional, pendapatan, penyusutan sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan LO positif/negatif. LO memiliki struktur keuangan yang sama dengan LRA. Namun pendapatan LO disajikan berdasarkan basis akrual, sedangkan pendapatan LRA disajikan berdasarkan basis kas. Harga LO ditampilkan berdasarkan akrual. Selain itu, LO menyediakan opsi pembayaran non tunai. Biaya-biaya tersebut antara lain: Biaya buku adalah nilai barang yang dikonsumsi/hilang (bukan nilai barang terjual) selama periode pelaporan. Biaya persediaan timbul setelah

penyesuaian nilai persediaan pada periode berjalan dikurangi saldo persediaan pada akhir periode. Keuntungan menampilkan akun utang usaha adalah LO dapat memberikan informasi nilai barang bekas atau usang selama periode pelaporan. Selain itu, nilai buku dikaitkan dengan nilai buku yang ditampilkan di neraca secara akrual pada tanggal pelaporan, sehingga menjamin keandalan nilai buku yang ditampilkan di neraca.

1. Penyusutan aktiva tetap adalah hilangnya nilai aktiva tetap selama umur aktiva tetap tersebut. Tarif tidak ditampilkan di database CTA. Basis data CTA mencakup penyusutan aset tetap sebagai penyusutan aset tetap dan investasi pada aset tetap. Manfaat pelaporan penyusutan LO dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aset tetap selama periode pelaporan.
2. Penyisihan piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus digunakan pada tingkat tertentu atas piutang tak tertagih yang berkaitan dengan penagihan utang dan tagihan. Menurut CTA, pencatatan piutang dicatat dengan baik untuk mengurangi piutang usaha dan membayar piutang. Dampak dari pertunjukan tersebut.
3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah dimana LO dapat memberikan informasi mengenai nilai utang yang tidak dapat ditagih/dihapuskan selama periode akuntansi karena tidak dapat dipulihkan. LO menunjukkan laba/rugi dari aktivitas nonpengendali, termasuk laba/rugi dari penjualan aset jangka panjang dan pembayaran utang jangka panjang. LO juga menunjukkan surplus/defisit pos-pos luar biasa termasuk pendapatan dan pengeluaran.

#### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(LPE)**

LPE ditampilkan dalam akun berdasarkan akrual. LPE menunjukkan kenaikan/penurunan ekuitas selama suatu periode pelaporan. LPE berkaitan dengan LO dan neraca. LPE memasukkan nilai surplus/batas LO sebagai kenaikan/pengurangan dari ekuitas dan memberikan saldo ekuitas akhir yang ditunjukkan di neraca. LPE Pemerintah Kota Batu tahun 2015 berupa aset primer, saldo/defisit LO, efek kumulatif perubahan kebijakan/defisit fundamental, reformasi fundamental yang berdampak langsung pada pemilik modal dan keadilan final.

**2**  
**LAPORAN ARUS KAS(LAK)**

SAR pada laporan keuangan CTA dan laporan keuangan dalam proses tidak berbeda karena adanya perbedaan penggunaan SAP. LAK ditampilkan dalam dana dalam laporan keuangan terkait CTA dan dana tersebut. Perbedaan SAR kedua laporan keuangan<sup>20</sup> bergantung pada jenis/sumber pendapatan dan sifat pembayarannya, yang tidak sama setiap tahunnya. LAK Arus kas dari aktivitas operasi, Arus kas dari aktivitas investasi, Arus kas dari aktivitas pendanaan, Arus kas dari aktivitas perdagangan, Kenaikan/penurunan arus kas selama periode pelaporan, Awal pendapatan dari BUD, Akhir BUD. , saldo awal dana investasi JKN, saldo akhir dana investasi JKN, dan saldo akhir.

**7**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan asli</b>	<b>1.702.350,00</b>	1.702.350,00	0,00
4.1.1.	<b>desa</b>			
4.2.	Hasil usaha desa	1.702.350,00	1.702.350,00	0,00
4.2.1.	<b>Pendapatan transfer</b>	<b>1.287.033.375,00</b>	1.287.033.375,00	0,00
4.2.2.			0	
	Dana desa	7.604.000,00	7.604.000,00	0,00
4.2.3.	Bagi hasil pajak dan redistribusi	29.964.285,00	29.964.285,00	0,00
4.3.	Alokasi dana desa	469.465.090,00	469.465.090,00	0,00
4.3.6.	<b>Pendapatan lain lain</b>	<b>0,00</b>	1.517.261,00	(1.517.261,00)
	Bunga bank	0,00	1.517.261,00	(1.517.261,00)
5	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.288.735.725,00</b>	<b>1.290.252.986,00</b>	<b>(1.517.261,00)</b>
5.1.	<b>BELANJA</b>			
5.1.1.	<b>Belanja pegawai</b>	<b>327.496.360,00</b>	<b>327.496.360,00</b>	<b>0,00</b>
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.2.				
	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	229.025.620,00	229.025.620,00	0,00
5.1.3.				
	Jaminan sosial kepala desa dan perangkat	4.191.060,00	4.191.060,00	0,00

	desa			
	Tunjangan BPD	65.160.000.00	65.160.000.00	0.00
5.1.4.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>515.244.139.00</b>	<b>501.402.749.00</b>	<b>13.841.390.00</b>
5.2.	Belanja barang	159.888.639.00	148.193.797.00	11.394.842.00
5.2.1.	pelengkapan			
	Belanja jasa	104.750.000.00	102.050.000.00	2.700.000.00
5.2.2.	honorarium			
	Belanja perjalanan dinas	41.000.000.00	41.000.000.00	0.00
5.2.3.				
5.2.5.	Belanja operasional perkantoran	4.657.000.00	4.960.452.00	(303.452.00)
	Belanja pemeliharaan	21.268.000.00	21.268.000.00	0.00
5.2.6.				
5.2.7.	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada	183.680.500.00	183.680.500.00	50.000.00
	<b>Belanja modal</b>	<b>254.021.560.00</b>	<b>254.021.560.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.	Belanja modal	24.1000.000.00	24.1000.000.00	0.00
5.3.2.	pengadaan peralatan, mesin dan alat			
	Belanja modal irigasi/embung/drainasee/air limbah	229.912.560.00	229.912.560.00	0.00
5.3.7.			<b>194.400.000.00</b>	<b>8.118.100.00</b>
5.4	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>202.518.100.00</b>		
	Belanja tidak terduga	202.518.100.00	194.400.000.00	8.118.100.00
5.4.1.	<b>Jumlah belanja</b>	<b>1.299.271.159.00</b>	<b>1.227.311.669.00</b>	<b>21.959.490.00</b>
			<b>0</b>	
6	<b>Surplus/(devisit)</b>	<b>(10.535.434.00)</b>	<b>12.941.317.00</b>	<b>(23.476.751.00)</b>
6.1.	<b>Pembiayaan Penerimaan pembiayaan</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>00</b>
6.1.1.	SILPA tahun sebelumnya	10.535.434.00	10.535.434.00	00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	10.535.434.00	10.535.434.00	00

**7**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAN G) (Rp)
1	2	3	4	5
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	23.476.751.00	(23.476.751.00)

Dalam menganalisis laporan keuangan berbasis kas menuju akrual, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan berdasarkan data yang disajikan. Secara keseluruhan, laporan keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1.290.252.986,00 melebihi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.288.735.725,00 dengan selisih sebesar Rp1.517.261,00. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain dan bunga bank yang tidak direncanakan, yang menambah total pendapatan.

Di sisi belanja, realisasi belanja sebesar Rp1.227.311.669,00 juga lebih rendah dibandingkan anggaran Rp1.299.271.159,00, menghasilkan surplus belanja sebesar Rp21.959.490,00. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam komponen belanja barang dan jasa, terutama pada belanja operasional perkantoran yang mengalami kekurangan realisasi sebesar Rp303.452,00 dan belanja barang pelengkapan yang surplus sebesar Rp11.394.842,00.

Surplus anggaran di laporan kas menunjukkan bahwa setelah belanja, terdapat selisih surplus Rp12.941.317,00, sementara akumulasi SILPA tahun sebelumnya menunjukkan saldo yang positif sebesar Rp10.535.434,00. Sehingga, total surplus pembiayaan adalah Rp10.535.434,00, meskipun ada selisih signifikan dalam laporan realisasi yang menunjukkan surplus yang lebih besar sebesar Rp23.476.751,00.

Perubahan dari rekening tunai ke rekening tunai memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi keuangan rumah tangg, karena basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa catatan akuntansi yang lebih detail untuk mencerminkan pengakuan pendapatan yang mungkin belum direalisasikan dalam laporan kas. Penerapan basis akrual akan membantu dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan dan aliran dana desa secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan dari laporan keuangan berbasis kas ke berbasis akrual memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan desa. Laporan berbasis kas, meskipun sederhana dan mudah dipahami, hanya mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dibayar, sehingga sering kali tidak mencerminkan kewajiban dan pendapatan yang belum terealisasi. Sebaliknya, laporan berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan finansial desa dengan mencatat semua hak dan kewajiban yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa laporan berbasis kas menunjukkan surplus yang tampak lebih tinggi, sementara laporan berbasis akrual mengungkapkan adanya pendapatan yang masih harus diterima dan kewajiban yang belum dibayar, yang menyesuaikan perspektif keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peralihan laporan berbasis akrual di desa akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses transisi ke akrual harus dilakukan secara bertahap dengan pelatihan dan penyesuaian sistem yang memadai untuk memastikan manfaat maksimal dari perubahan ini.

#### **1.2 SARAN**

**Saran untuk Desa:** Meningkatkan pengelolaan keuangan dan transparansi, desa disarankan untuk mulai mempertimbangkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pelatihan bagi staf keuangan dan penyesuaian sistem akuntansi yang ada. Desa sebaiknya melakukan uji coba atau fase peralihan bertahap untuk memahami tantangan dan manfaat dari sistem akrual secara praktis. Penilaian berkala selama fase transisi akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala serta memastikan bahwa sistem baru dapat berfungsi dengan baik dan memberikan informasi keuangan yang lebih akurat.

**Saran untuk Peneliti Selanjutnya:** Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan studi mendalam mengenai dampak praktis dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di desa-desa yang telah menggunakannya. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup analisis cost-benefit dari implementasi akrual, serta identifikasi tantangan operasional yang dihadapi oleh desa selama transisi. Studi

kasus di berbagai desa dengan karakteristik berbeda juga akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas dan adaptasi sistem akrual. Penelitian ini sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan desa, seperti aparat desa dan masyarakat, untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai perubahan ini dan untuk mengembangkan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Adi Bagus Prasetio, Roni Andespa, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Kata Pengantar. 2020. "Tugas Akhir Tugas Akhir." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012* (1): 41–49.
- GOOD, GOOLMAN. 2015. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (April): 10–22.
- Indonesia, Undang-undang Republik. 2014. "https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm 1/44."
- Putri, S E. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura." <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6563%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6563/1/155310267.pdf>.
- Tulangow, Andre P., dan VentjeTreesje Runtu Ilat. 2014. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (4): 278–88.



# ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI

---

ORIGINALITY REPORT

---

## 20%

SIMILARITY INDEX

---

### PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet	484 words — 6%
2	<a href="https://jimfeb.ub.ac.id">jimfeb.ub.ac.id</a> Internet	445 words — 6%
3	<a href="https://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet	120 words — 2%
4	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet	104 words — 1%
5	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	69 words — 1%
6	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	68 words — 1%
7	<a href="https://jdih.nganjukkab.go.id">jdih.nganjukkab.go.id</a> Internet	61 words — 1%
8	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet	52 words — 1%
9	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	46 words — 1%

---

10 Imamatin Listya Putri. "Analisis Penerapan Akuntansi dan Sistem Informasi Dana Desa", Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 2023  
Crossref 44 words — 1%

---

11 repository.unpas.ac.id  
Internet 41 words — 1%

---

12 www.coursehero.com  
Internet 41 words — 1%

---

EXCLUDE QUOTES OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%  
EXCLUDE MATCHES OFF